

STATISTIK KETENAGAKERJAAN

KABUPATEN WAKATOBI 2020



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN WAKATOBI**

STATISTIK KETENAGAKERJAAN

KABUPATEN WAKATOBI 2020



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN WAKATOBI**

Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Wakatobi 2020

Nomor ISBN : -
Nomor Publikasi : 74070.2119
Katalog BPS : 2301004.7407

Ukuran Buku : 14,8 x 21 cm

Jumlah Halaman : viii + 58 halaman

Naskah

BPS Kabupaten Wakatobi

Penyunting

BPS Kabupaten Wakatobi

Gambar Kulit

BPS Kabupaten Wakatobi

Diterbitkan oleh

© Badan Pusat Statistik Kabupaten Wakatobi

Dicetak oleh

Badan Pusat Statistik Kabupaten Wakatobi

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Ketenagakerjaan merupakan publikasi yang diterbitkan setiap tahun oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Publikasi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi bidang ketenagakerjaan. Publikasi ini memuat tabel-tabel yang menggambarkan keadaan angkatan kerja di Kabupaten Wakatobi pada tahun 2020.

Publikasi Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 memuat berbagai informasi umum terkait situasi ketenagakerjaan, yaitu menyangkut masalah angkatan kerja, partisipasi angkatan kerja, tingkat kesempatan kerja, tingkat pengangguran, penduduk yang bekerja, lapangan pekerjaan dan status pekerjaan di tingkat wilayah Kabupaten Wakatobi. Data-data pokok yang digunakan sebagian besar bersumber dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional 2020 (Sakernas) yang diolah BPS Kabupaten Wakatobi serta data-data lain yang relevan untuk dijadikan sebagai bahan penunjang analisis.

Kami menyadari meskipun telah diupayakan secara maksimal, akan tetapi publikasi ini masih belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan untuk perbaikan dan kesempurnaan publikasi yang akan datang.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga terbitnya publikasi ini dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Wangi-wangi, Desember 2020
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Wakatobi

Towedy Marthinus Layico, S.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Grafik	viii
Bab 1. Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	3
1.3. Sumber Data	4
1.4. Sistematika Penyajian	4
Bab 2. Konsep dan Definisi	
2.1. Konsep dan Definisi Ketenagakerjaan	6
2.2. Konsep dan Definisi Berbagai Indikator Terkait Ketenagakerjaan	19
Bab 3. Profil Penduduk Usia Kerja	
3.1. Penduduk Usia Kerja	22
3.2. Angkatan Kerja	25
Bab 4. Profil Penduduk Bekerja	
4.1. Penduduk Bekerja	34
4.2. Penduduk yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin	36
4.3. Penduduk yang Bekerja Menurut Ijazah Terakhir yang Dimiliki	38
4.4. Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama	41

4.5.	Penduduk yang Bekerja Menurut Status pada Pekerjaan Utama	44
4.6.	Penduduk yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja	50

Bab 5. Profil Penganggur Terbuka

5.1.	Profil Penganggur Terbuka	54
5.2.	Penganggur Terbuka Menurut Jenis Kelamin	55
5.3.	Penganggur Terbuka Menurut Ijazah Terakhir yang Dimilki	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Upaya pembangunan suatu daerah merupakan suatu upaya yang berkesinambungan dimana proses ini akan senantiasa dikembangkan dengan berbagai perbaikan dan penyempurnaan di segala bidang kehidupan dari waktu ke waktu. Dalam proses pembangunan tersebut, mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan menjadi target utama. Berangkat dari target tersebut, berbagai kebijakan dan strategi ditempuh oleh para pengambil kebijakan, tidak terkecuali kebijakan terkait aspek perekonomian yang memegang peranan penting dalam menunjang kehidupan masyarakat.

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi di suatu daerah, kajian terhadap aspek ketenagakerjaan merupakan hal penting yang dapat menjadi indikator kemajuan perekonomian. Dalam hal ini, tenaga kerja merupakan objek sekaligus subjek dalam pembangunan.

Sebagai modal pembangunan, tenaga kerja dapat mempercepat perkembangan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan berdasarkan prinsip ekonomi kerakyatan.

Untuk melakukan kajian yang lebih dalam mengenai potensi dan tantangan ketenagakerjaan di suatu daerah, data terkait hal tersebut menjadi alat yang paling penting yang diharapkan dapat dijadikan acuan dalam proses pembangunan mulai dari dasar pengambilan kebijakan, dasar monitoring dalam pengawalan pembangunan, serta dasar evaluasi terhadap capaian hasil kinerja pembangunan. Data ketenagakerjaan yang akurat dan berkesinambungan dapat menjadi tolak ukur sejauh mana kebijakan telah dapat mengembangkan potensi ketenagakerjaan di suatu daerah, indikasi masalah bidang ketenagakerjaan, serta upaya apa yang sekiranya diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.

Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga pemerintah penyedia data terutama statistik dasar yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan, setiap tahun mengumpulkan data yang memuat indikator-

indikator ketenagakerjaan, yakni melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Hasil dari Sakernas memuat informasi – informasi bidang ketenagakerjaan seperti lapangan dan status pekerjaan penduduk, pengangguran dan karakteristik pekerja.

Berangkat dari kesadaran pentingnya indikator ketenagakerjaan guna mendapatkan gambaran atau kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Wakatobi, Badan Pusat Statistik Kabupaten Wakatobi menyusun publikasi “Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Wakatobi 2020”.

Publikasi ini menampilkan indikator-indikator umum ketenagakerjaan pada tahun 2020. Beberapa istilah ketenagakerjaan yang digunakan juga ditampilkan guna membantu para pengguna data dalam menginterpretasikan dan melakukan analisis atas informasi yang disajikan.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan publikasi ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai profil ketenagakerjaan Kabupaten Wakatobi serta menyediakan data statistik ketenagakerjaan yang

meliput karakteristik penduduk yang bekerja dan pengangguran di Kabupaten Wakatobi. Selain itu, penyusunan buku ini dapat pula dimanfaatkan sebagai acuan dalam evaluasi program pembangunan perekonomian serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.3 Sumber Data

Data yang disajikan dalam publikasi ini merupakan hasil dari Sakernas yang dilaksanakan pada Agustus tahun 2020 dan sebagian mencantumkan pula data Sakernas tahun 2019 yang dilaksanakan secara serentak di seluruh kabupaten/kota di Indonesia, termasuk kabupaten Wakatobi.

1.4 Sistematika Penyajian

Penyajian uraian dalam publikasi ini dikelompokkan menjadi tujuh bagian. Data terkait ketenagakerjaan disajikan dalam bentuk tabel dan grafik serta ulasan yang padat dan jelas agar mudah dimengerti oleh semua pengguna data. Adapun rinci susunan publikasi ini adalah sebagai berikut:

Bab 1. Pendahuluan

Bab 2. Metodologi

Berisi penjelasan-penjelasan teknis terkait Sakernas 2020.

Bab 3. Profil Penduduk Usia Kerja

Meliputi penduduk usia kerja, angkatan kerja, bukan angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Bab 4. Profil Penduduk yang Bekerja

Meliputi penduduk yang bekerja menurut jenis kelamin, Pendidikan, lapangan pekerjaan utama, status dalam pekerjaan utama, dan jumlah jam kerja.

Bab 5. Profil Pengangguran Terbuka

Meliputi pengangguran terbuka menurut jenis kelamin, kelompok umur, Pendidikan, dan jenis pengangguran.

BAB II

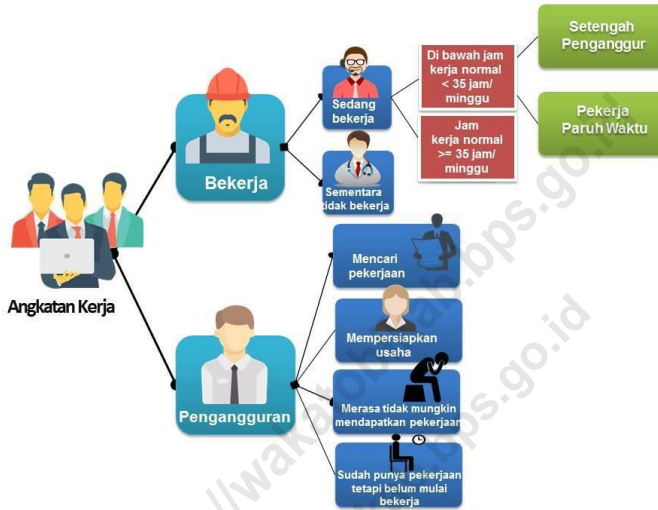
KONSEP DAN DEFINISI

2.1. Konsep dan Definisi Ketenagakerjaan

Konsep dan definisi yang digunakan dalam pengumpulan data ketenagakerjaan oleh Badan Pusat Statistik adalah *The Labour Force Concept* yang disarankan oleh *International Labour Organization (ILO)*. Konsep ini membagi penduduk menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Selanjutnya, penduduk usia kerja dibedakan juga menjadi dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang sedang dilakukannya. Kelompok tersebut adalah **Angkatan Kerja** dan **Bukan Angkatan Kerja**.



Gambar 1. Diagram Ketenagakerjaan



Gambar 2. Diagram Ketenagakerjaan (Lanjutan)

Beberapa konsep dan definisi terkait ketenagakerjaan yang digunakan BPS dalam Sakernas antara lain:

1. **Penduduk** adalah semua orang yang berdomisili di suatu wilayah geografis selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.
2. **Penduduk Usia Kerja**

Terdapat beberapa pendekatan dalam menentukan batas usia kerja, bergantung pada kebutuhan dan arah analisa yang diinginkan. Dalam publikasi ini, batas usia kerja yang digunakan adalah penduduk yang berusia 15 tahun

keatas. Penduduk usia kerja dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu:

- a. **Bukan Angkatan Kerja** adalah penduduk usia 15 tahun keatas yang selama seminggu yang lalu (pada masa referensi survei) hanya melakukan aktifitas sekolah, mengurus rumah tangga, atau tidak melakukan suatu kegiatan yang dapat dimasukkan dalam kategori bekerja atau mencari pekerjaan. Adapun definisi dari kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:
 - i. **Sekolah** yaitu kegiatan bersekolah formal maupun non formal baik pada jenjang pendidikan dasar, menengah, maupun pendidikan tinggi.
 - ii. **Mengurus rumah tangga** yaitu kegiatan mengurus rumah tangga atau membantu mengurus rumah tangga tanpa mendapatkan gaji/upah (seperti menyapu, memasak, mencuci, dll). Seorang pembantu rumah tangga yang melakukan kegiatan mengurus rumah tangga dianggap bekerja, karena mereka melakukannya untuk mendapatkan gaji/upah.
 - iii. **Kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi**, yaitu kegiatan selain bekerja, sekolah, dan mengurus rumah tangga. Kegiatan lainnya yang dicakup

disini adalah kegiatan yang bersifat aktif seperti: olahraga, kursus, piknik, dan kegiatan sosial ataupun keagamaan. Tidak termasuk kegiatan pribadi seperti tidur, santai, bermain, dan tidak melakukan kegiatan apapun

Termasuk didalam Bukan Angkatan Kerja, mereka yang tidak mampu melakukan kegiatan, seperti orang lanjut usia, cacat jasmani dan penerima pendapatan/pensiun yang tidak bekerja lagi.

- b. **Angkatan Kerja** adalah penduduk usia 15 tahun keatas yang selama seminggu yang lalu (pada masa referensi survei) mempunyai pekerjaan, baik yang memang melakukan aktifitas bekerja maupun yang sementara tidak bekerja karena satu dan lain hal seperti sedang cuti, menunggu panen, atau sedang menunggu pekerjaan berikutnya (pekerja profesional seperti penyanyi, dukun, dalang, dsb). Selain itu, termasuk pula kedalam kategori angkatan kerja yaitu mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan atau mengharapkan dapat pekerjaan (pengangguran).

Penduduk angkatan kerja dapat dikelompokkan menjadi 2 golongan, yaitu:

- i. **Bekerja**, yaitu orang yang melakukan suatu

kegiatan denganmaksud untuk memperoleh penghasilan atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan. Kegiatan tersebut dilakukan selama minimal satu jam berturut-turut tanpa terputus dalamseminggu yang lalu (waktu referensi survei). Pekerja keluarga yang tidak dibayar juga termasuk kelompok penduduk yang bekerja karena mereka membantu memperoleh penghasilan.

Diantara kelompok orang yang bekerja, terdapat dua kategori, yakni mereka yang aktif bekerja dan mereka yang sementara tidak bekerja.

Sementara tidak bekerja, yaitu seseorang yang mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu (masa referensi survei) sedang sementara tidak bekerja karena berbagai sebab seperti sakit, cuti, menunggu panen, mogok kerja, dan sebagainya. Termasuk pula para pekerja profesional (pekerjaan yang membutuhkan keahlian tertentu/khusus seperti penyanyi, pengacara, dalang, dukun, dll) yang sedang menunggu pekerjaan selanjutnya, menunggu pesanan, atau sementara tidak bekerja karena sakit.

Untuk mengetahui jumlah penduduk yang bekerja, dapat dihitung dari beberapa kriteria tersebut dengan rumusan:

Penduduk bekerja = penduduk yang aktif bekerja +
penduduk yang sementara
tidak bekerja

Berdasarkan jumlah jam kerja selama seminggu yang lalu (masa referensi survei), mereka yang aktif bekerjadibedakan menjadi 2 golongan:

- **Pekerja penuh**, yaitu pekerja yang bekerja selama minimal 35 jam (secara kumulatif) selama seminggu yang lalu (masa referensi survei).
- **Pekerja tidak penuh**, yaitu pekerja yang bekerja dibawah jam kerja normal atau kurang dari 35 jam seminggu. Pekerja tidak penuh terdiri dari:
 - **Setengah penganggur / setengah penganggur terpaksa**, yaitu mereka yang bekerja dibawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu) dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia

menerima pekerjaan.

- **Pekerja paruh waktu / setengah penganggur sukarela**, yaitu mereka yang bekerja dibawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain.

ii. **Pengangguran** yaitu orang yang belum memiliki pekerjaan atau seseorang yang ingin bekerja dan/atau memiliki kemampuan bekerja tetapi tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Beberapa kriteria pengangguran antara lain:

- **Mencari Kerja**, yaitu orang yang berusaha mencari pekerjaan (tidak terbatas pada seminggu yang lalu), seperti mereka:
 - a. belum pernah bekerja dan sedang berusahamendapatkan pekerjaan.
 - b. sudah pernah bekerja, karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan.
 - c. bekerja atau mempunyai pekerjaan, tetapi karena sesuatu hal masih berusaha untuk mendapatkan pekerjaan lain.

Usaha mencari pekerjaan ini tidak terbatas pada seminggu sebelum pencacahan, jadi mereka yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan dan yang permohonannya telah dikirim lebih dari satu minggu yang lalu tetap dianggap sebagai mencari pekerjaan asalkan seminggu yang lalu masih mengharapkan pekerjaan yang dicari.

- **Mempersiapkan usaha**, yaitu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha baru (bukan merupakan pengembangan usaha) dan bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, baik dengan atau tanpa mempekerjakan orang lain. Mempersiapkan yang dimaksud adalah apabila tindakannya nyata, seperti mengumpulkan modal atau perlengkapan/alat, mencari lokasi/tempat, mengurus surat ijin usaha dan sebagainya telah/sedang dilakukan. Mempersiapkan usaha tidak termasuk yang baru merencanakan, berniat, dan baru mengikuti kursus/pelatihan dalam rangka membuka

usaha.

- **Merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan**, yaitu mereka yang mengaku berkali-kali mencari pekerjaan tetapi tidak berhasil mendapatkan pekerjaan sehingga ia merasa tidak mungkin mendapat kan pekerjaan (putus asa).
- **Sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja**, yaitu mereka yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja, tetapi pada saat pencacahan belum mulai bekerja. Jumlah pengangguran atau juga biasa disebut sebagai penganggur terbuka dapat dihitung dari beberapa kriteria tersebut dengan rumusan:

Pengangguran/ penganggur terbuka=

- ✓ Penduduk yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan
- ✓ Penduduk yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha
- ✓ Penduduk yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan
- ✓ Penduduk yang sudah mempunyai pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja

3. **Lapangan pekerjaan** adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/ kantor tempat seseorang bekerja. Lapangan pekerjaan pada publikasi ini didasarkan pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)2020 yang merupakan penyempurnaan dari KBLI 2015 dikarenakan adanya perubahan proses bisnis karena perkembangan teknologi/ digitalisasi ataupunpenyesuaian kondisi usaha.
4. **Jenis pekerjaan/ jabatan** adalah macam pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau ditugaskan kepada seseorang yang sedang bekerja atau yang sementara tidak bekerja. Jenis pekerjaan pada publikasi ini, didasarkan atas Klasifikasi Baku Jenis Pekerjaan Indonesia (KBJI) 2014mengacu pada ISCO 2008.
5. **Upah/gaji bersih** adalah imbalan yang diterima selama sebulan oleh buruh/karyawan baik berupa uang atau barang yang dibayarkan perusahaan/kantor/majikan. Imbalan dalam bentuk barang dinilai dengan harga setempat. Upah/ gaji bersih yang dimaksud tersebut adalah setelah dikurangi dengan potongan-potongan iuran wajib, pajak penghasilan dan sebagainya.
6. **Status pekerjaan** adalah jenis kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan.

Mulai tahun 2001 status pekerjaan dibedakan menjadi 7 kategori yaitu:

- a. ***Berusaha sendiri***, adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomis, yaitu dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta **tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar**, termasuk yang sifat pekerjaannya memerlukan teknologi atau keahlian khusus.
- b. ***Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar***, adalah bekerja atau berusaha atas resiko sendiri, dan menggunakan buruh/pekerja tak dibayar dan atau buruh/pekerja tidak tetap.
- c. ***Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar***, adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh/pekerja tetap yang dibayar.
- d. ***Buruh/Karyawan/Pegawai***, adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang. Buruh yang tidak mempunyai majikan tetap,

tidak digolongkan sebagai buruh/karyawan, tetapi sebagai pekerja bebas. Seseorang dianggap memiliki majikan tetap jika memiliki 1 (satu) majikan (orang/rumah tangga) yang sama dalam sebulan terakhir. Apabila majikannya instansi/lembaga, boleh lebih dari satu. **Majikan** adalah orang atau pihak yang memberikan pekerjaan dengan pembayaran yang disepakati.

- e. **Pekerja bebas di pertanian**, adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir) di usaha pertanian baik berupa usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. Usaha pertanian meliputi: pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan perburuan, termasuk juga jasa pertanian.
- f. **Pekerja bebas di nonpertanian** adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir), di usaha non pertanian dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang

dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. Usaha non pertanian meliputi: usaha di sektor pertambangan, industri, listrik, gas dan air, sektor konstruksi/ bangunan, sektor perdagangan, sektor angkutan, pergudangan dan komunikasi, sektor keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan, sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan.

g. ***Pekerja keluarga/tak dibayar*** adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha dengan tidak mendapat upah/gaji, baik berupa uang maupun barang. Pekerja tidak dibayar dapat terdiri dari:

- Anggota rumah tangga dari orang yang dibantunya, seperti istri yang membantu suaminya bekerja dan tidak dibayar.
- Bukan anggota rumah tangga tetapi keluargadari orang yang dibantunya seperti famili yang membantu melayani penjualan di warung dan tidak dibayar.
- Bukan anggota rumah tangga dan bukan keluarga dari orang yang dibantunya

2.2. Konsep dan Definisi Berbagai Indikator Terkait Ketenagakerjaan

1. **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)** merupakan persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK menunjukkan rasio penduduk usia kerja yang telah siap terjun ke dunia kerja (membutuhkan pekerjaan), baik yang sudah memperoleh pekerjaan maupun yang belum. Indikator ini mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Adapun rumusan penghitungan TPAK adalah sebagai berikut:

$$TPAK = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah penduduk 15 tahun keatas}} \times 100\%$$

2. **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)** merupakan ukuran yang dapat memberikan gambaran kepada konsumen data mengenai seberapa besar pengangguran yang ada.

Tingkat Pengangguran merupakan persentase penduduk angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan diantara penduduk usia kerja yang siap kerja (membutuhkan pekerjaan), tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Adapun rumusan penghitungan TPT atau Tingkat Pengangguran Terbuka adalah sebagai berikut:

$$TPT = \frac{\text{Jumlah pengangguran}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$$

3. **Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)** merupakan persentase penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja terhadap angkatan kerja. Indikator ini mengindikasikan besarnya angkatan kerja yang bekerja. Semakin tinggi nilai TKK, maka dapat diartikan bahwa kesempatan kerja semakin tinggi. Adapun rumusan penghitungan TKK adalah sebagai berikut:

$$TKK = \frac{\text{Penduduk angkatan kerjayang bekerja}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$$

4. **Tingkat Setengah Penganggur**, merupakan persentase penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja kurang dari jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Indikator ini dapat bermanfaat untuk dijadikan acuan pemerintah dalam meningkatkan utilisasi, kegunaan, dan produktifitas pekerja.

$$TSP = \frac{\text{Jumlah Setengah Pengangguran}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$$

5. **Employment to population ratio (EPR)** atau Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia kerja merupakan rasio antara penduduk yang bekerja terhadap

penduduk usia kerja. Adapun rumusan penghitungan *EPR* adalah sebagai berikut:

$$EPR = \frac{\text{Jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja}}{\text{JUmlah penduduk 15 tahun keatas}} \times 100\%$$

6. ***Employment in Excessive working time (EEWT)***, merupakan persentase pekerja yang bekerja lebih dari 48 jam dalam seminggu. Dalam konvensi pertama ILO, ditetapkan bahwa jam kerja kurang dari 48 jam seminggu merupakan jam kerja yang sehat. Bekerja lebih dari 48 jam seminggu dinilai dapat membahayakan kesehatan pekerja, baik secara fisik maupun mental. Adapun rumusan penghitungan *EEWT* adalah sebagai berikut:

$$EEWT = \frac{\text{Jumlah pekerja yang bekerja } > 48 \text{ jam per minggu}}{\text{JUmlah penduduk yang bekerja}} \times 100\%$$

BAB III

PROFIL PENDUDUK USIA KERJA

3.1. Penduduk Usia Kerja

Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, UU No. 13 Tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Menurut batasan BPS, seseorang dikatakan telah memasuki kategori penduduk usia kerja ketika telah berumur 15 tahun. Oleh karena itu, analisis ketenagakerjaan yang selanjutnya akan digunakan dalam publikasi ini adalah analisis ketenagakerjaan dari penduduk yang berusia 15 tahun keatas. Menurut pengertian diatas, dapat diartikan bahwa setiap penduduk dalam kategori usia kerja dan siap melakukan pekerjaan disebut sebagai tenaga kerja.

Pada tahun 2020, terdapat sejumlah 74.195 penduduk berusia 15 tahun keatas di Kabupaten Wakatobi, dimana 34.694 orang atau persen diantaranya merupakan penduduk laki-laki dan 53,24 persen sisanya merupakan penduduk perempuan yakni sejumlah 39.501 orang. Jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Wakatobi bertambah sekitar 5.669 orang dari tahun 2019 ke tahun 2020. Jumlah penduduk usia

kerja di seluruh Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai 1.351.092 orang pada tahun 2020. Artinya, sekitar 3,74 persen tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Tenggara berada di Kabupaten Wakatobi.

Jika dibandingkan terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Wakatobi hasil Sensus Penduduk sejumlah 111.402 jiwa, maka dapat dikatakan bahwa sekitar 66,60 persen penduduk berada pada kategori usia kerja. Peningkatan jumlah penduduk usia kerja terhadap total penduduk mengalami peningkatan dalam dua periode terakhir. Pada periode 2019-2020 terjadi peningkatan jumlah penduduk usia kerja sebesar 9.530 jiwa. Hal ini dimungkinkan karena adanya pandemi COVID-19 yang berimbas pada kembalinya pekerja asal Kabupaten Wakatobi dari perantauan ke kampung halaman. Hal ini memicu peningkatan jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Wakatobi pada tahun 2020.

Sex ratio penduduk usia kerja di Kabupaten Wakatobi pada tahun 2020 adalah 87,83. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat 87 hingga 88 penduduk laki-laki diantara 100 penduduk perempuan.

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Usia Kerja Kabupaten Wakatobi
menurut Jenis Kelamin Tahun 2018 - 2020

Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
2018	30.656	34.673	65.329
2019	30.266	34.399	64.665
2020	34.694	39.501	74.195

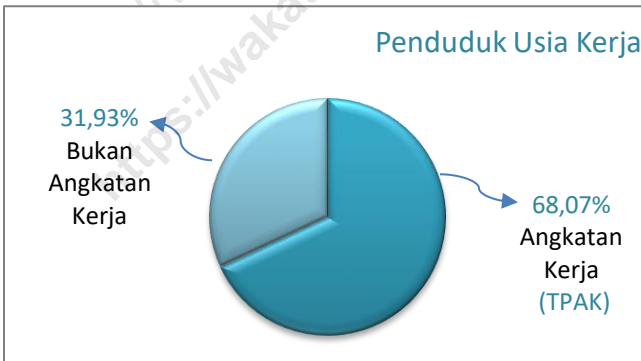
Sumber: Sakernas Agustus 2018 - 2020

Tabel 3.1 menunjukkan bahwa terjadi penambahan penduduk Usia Kerja dari tahun 2019 yakni 64.665 jiwa menjadi 74.195 jiwa pada tahun 2020.

3.2. Angkatan Kerja

Menurut aktifitas yang dilakukannya, penduduk usia kerja dapat digolongkan menjadi dua kategori yakni angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Pada tahun 2020, sebanyak 68,07 persen dari penduduk usia kerja di Kabupaten Wakatobi masuk pada kategori angkatan kerja, sedangkan 31,93 persennya termasuk pada kategori bukan angkatan kerja.

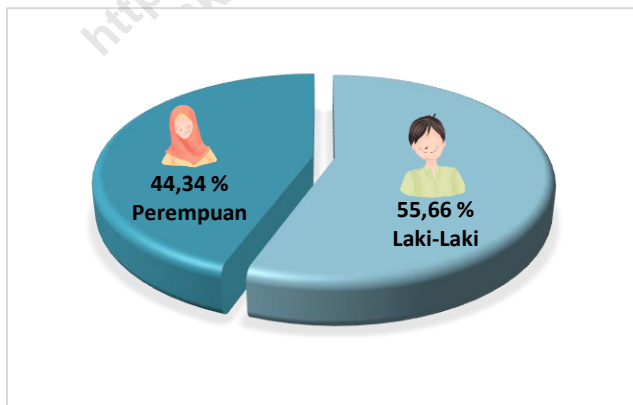
Grafik 3.2.
Persentase Penduduk Usia Kerja di Kabupaten
Wakatobi menurut Kategori Angkatan Kerja,
tahun 2020



Sumber: Sakernas 2020

Persentase penduduk yang tergolong sebagai angkatan kerja diantara penduduk usia kerja menghasilkan suatu indikator yang biasa disebut dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Indikator tersebut merupakan salah satu indikator ketenagakerjaan yang seringkali digunakan sebagai tolak ukur potensi tenaga kerja di suatu daerah. Indikator TPAK dapat menggambarkan besaran penduduk yang siap kerja di suatu daerah. TPAK Kabupaten Wakatobi tahun 2020 sebesar 68,07 persen artinya dari 100 penduduk usia kerja di Kabupaten Wakatobi, 68 orang tersedia atau siap untuk melakukan berbagai aktifitas ekonomi.

Grafik 3.3.
Persentase Angkatan Kerja di Kabupaten Wakatobi menurut Jenis Kelamin, tahun 2020



Sumber: Sakernas 2020

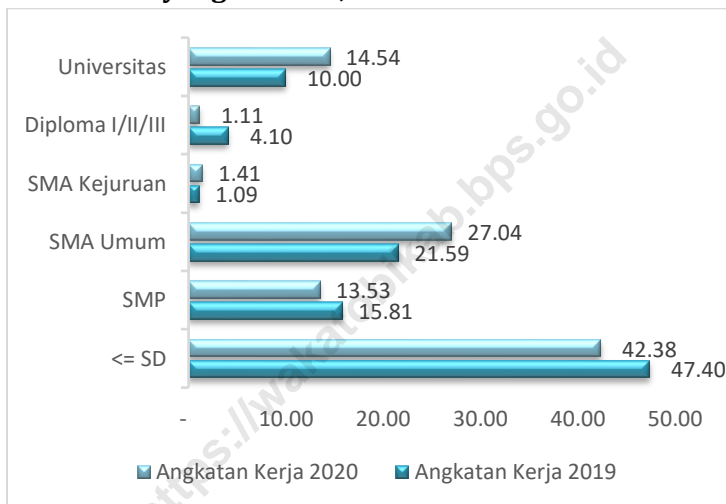
Jika dibedakan berdasarkan jenis kelamin, jumlah angkatan kerja laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan angkatan kerja perempuan, dimana angkatan kerja laki-laki sebanyak 28.110 jiwa atau 55,66 persen dari seluruh angkatan kerja di Kabupaten Wakatobi pada tahun 2020. Sedangkan angkatan kerja perempuan sebanyak 22.397 jiwa atau 44,34 persen dari seluruh angkatan kerja, sebagaimana ditunjukkan pada grafik 3.3.

Data tersebut menunjukkan bahwa pasokan tenaga kerja laki-laki di Kabupaten Wakatobi lebih banyak dibandingkan perempuan. Terkait dengan hal tersebut, dalam menyediakan lapangan pekerjaan baru, pemerintah harus mempertimbangkan keseimbangan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan agar penyerapan tenaga kerja untuk laki-laki dan perempuan juga dapat seimbang. Kondisi ini membuat perempuan harus mampu bersaing dengan tenaga kerja laki-laki untuk bisa memperoleh pekerjaan.

Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan, data Sakernas 2020 menunjukkan bahwa sebagian besar angkatan kerja di Kabupaten Wakatobi berlatar belakang pendidikan SD kebawah yakni sebesar 42,38 persen. Proporsi terbanyak selanjutnya adalah mereka yang berlatar belakang pendidikan SMA Umum

Sederajat, yakni sebanyak 27,04 persen dan diikuti dengan angkatan kerja yang berlatar belakang pendidikan Universitas sebanyak 14,54 persen.

Grafik 3.4.
Persentase Angkatan Kerja menurut Ijazah tertinggi yang dimiliki, tahun 2019-2020



Sumber: Sakernas 2019-2020

Distribusi penduduk angkatan kerja berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang telah ditamatkan pada tahun 2020 mengalami perubahan yang cukup signifikan pada beberapa kategori jenjang pendidikan, jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019. Pada tahun 2020, proporsi angkatan kerja yang berlatar belakang pendidikan SMA/MA Umum dan Universitas mengalami

peningkatan sedangkan persentase angkatan kerja dengan latar belakang pendidikan SD kebawah mengalami penurunan. Jika ditelaah lebih lanjut, data tersebut mengindikasikan bahwa warga Kabupaten Wakatobi yang kembali ke kampung halaman akibat pandemi COVID-19 sebagian besar adalah angkatan kerja yang berlatar pendidikan SMA Umum dan Universitas.

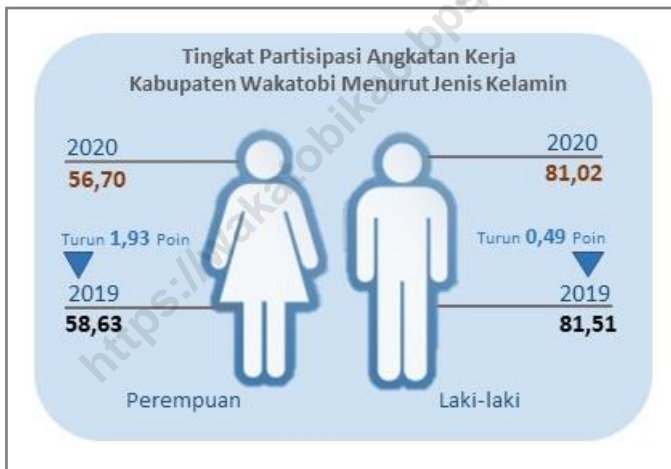
TPAK menunjukkan besarnya pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia dan dapat diberdayakan di berbagai bidang pekerjaan. Apabila suatu wilayah ingin mengukur seberapa banyak lapangan pekerjaan yang dibutuhkan untuk dapat menyerap seluruh tenaga kerja, maka indikator ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dengan mempertimbangkan pula aspek potensi kewilayahan.

Jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019, TPAK Kabupaten Wakatobi pada tahun 2020 mengalami penurunan dari 69,34 pada tahun 2019 menjadi 68,07 pada tahun 2020. Pada tahun 2019, posisi Kabupaten Wakatobi berada pada posisi ketujuh dengan TPAK terkecil diantara 17 Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara setelah Kabupaten Kolaka sedangkan pada tahun 2020, posisi Wakatobi bergeser menjadi posisi keduabelas.

Berdasarkan data pada Grafik 3.6 tentang TPAK

Kabupaten Wakatobi menurut jenis kelamin, terjadi penurunan TPAK pada kelompok penduduk perempuan dan laki-laki. TPAK pada kelompok penduduk perempuan menurun sebesar 1,93 poin sedangkan TPAK di kalangan penduduk laki-laki menurun sebesar 0,49 poin saja.

Grafik 3.6.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Kabupaten Wakatobi menurut Jenis Kelamin
tahun 2019 dan 2020



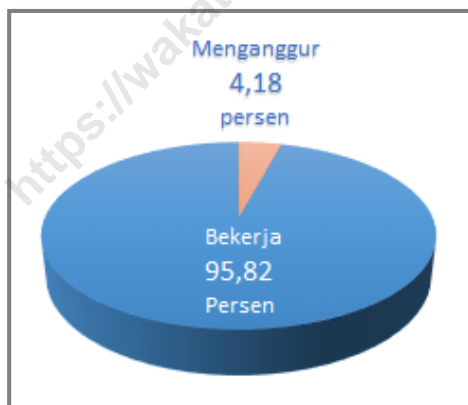
Sumber: Sakernas 2019 dan 2020

Pada tahun 2019 hingga tahun 2020, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja laki-laki di Kabupaten Wakatobi lebih besar dibandingkan dengan TPAK perempuan. Pada tahun 2019, diantara 100 penduduk laki-laki terdapat 81 hingga 82 orang yang siap kerja, diantara 100 penduduk

perempuan hanya 58 hingga 59 orang yang siap kerja. Sedangkan pada tahun 2020, diantara 100 penduduk laki-laki yang berusia 15 tahun keatas, terdapat 81 orang yang siap kerja, dan diantara 100 penduduk perempuan yang berusia 15 tahun keatas hanya 56 hingga 57 orang yang siap kerja.

Diantara penduduk yang tergolong angkatan kerja, terdapat sebanyak 95,82 persen yang aktif bekerja selama seminggu yang lalu (masa referensi survei), sedangkan 4,18 persen sisanya tergolong sebagai pengangguran.

Grafik 3.7.
Persentase Angkatan Kerja menurut Klasifikasi Bekerja dan Menganggur, tahun 2020

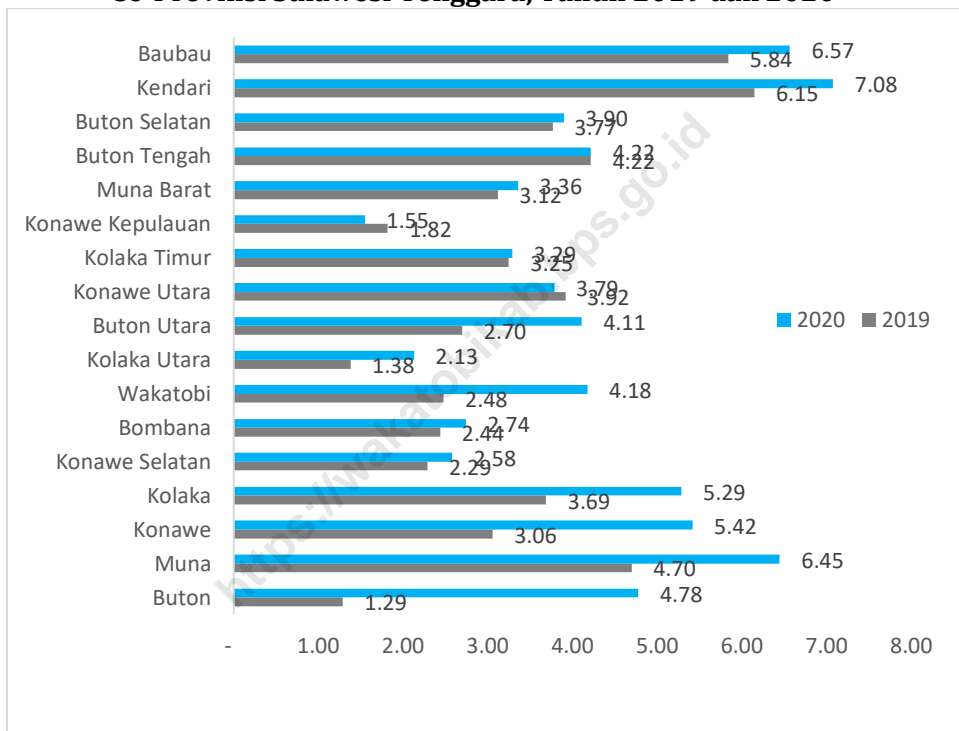


Sumber: Sakernas 2020

Proporsi angkatan kerja yang menganggur dikenal dengan nama Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Angka TPT sebesar 4,18 persen artinya diantara 100 orang penduduk

yang siap kerja, terdapat 4 orang yang tidak dapat terserap oleh lapangan pekerjaan yang ada.

Grafik 3.8.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2019 dan 2020



Sumber: Sakernas 2019 dan 2020

Dalam kurun waktu 2018-2020, tingkat pengangguran di Kabupaten Wakatobi terus mengalami peningkatan dari 2,43persen pada tahun 2018 menjadi 2,48 persen pada tahun2019, hingga mencapai 4,18 persen pada tahun 2020. Pada periode 2018-2019, terjadi peningkatan

sebesar 0,05 persen sedangkan pada periode 2019-2020, peningkatan angka pengangguran sebesar 1,70 persen.

Peningkatan angka pengangguran pada tahun 2020 hampir terjadi di semua kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dari 17 kabupaten/kota, hanya 3 kabupaten/kota yang tidak mengalami peningkatan angka pengangguran. Hal ini merupakan gambaran bagaimana dampak yang ditimbulkan dari adanya pandemi yang memukul perekonomian.

Pada grafik 3.8 tampak bahwa peningkatan angka pengangguran di Kabupaten Wakatobi berada pada urutan kedelapan dari 17 Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara.

BAB IV

PROFIL PENDUDUK BEKERJA

4.1. Penduduk Bekerja

Pada bagian sebelumnya dalam publikasi ini, telah disebutkan bahwa sekitar 95,82 persen dari 50.507 angkatan kerja yang ada di Kabupaten Wakatobi pada tahun 2020 tergolong sebagai penduduk yang bekerja. Berdasarkan data hasil Sakernas 2020, jumlah penduduk yang bekerja di Kabupaten Wakatobi adalah sekitar 48.397 jiwa, bertambah sekitar 4.670 jiwa dibandingkan kondisi pada tahun 2019 yang hanya sejumlah 43.727 jiwa.

Untuk mengevaluasi sejauh mana kemampuan pembangunan ekonomi suatu wilayah dalam menciptakan lapangan kerja, terdapat suatu indikator yang dapat dijadikan acuan, yakni rasio antara penduduk yang bekerja terhadap penduduk usia kerja atau yang biasa disebut dengan *Employment-to-Population Ratio (EPR)*. Indikator ini bersama dengan indikator tingkat pengangguran dapat menjadi sebuah kajian tentang posisi pasar tenaga kerja di suatu wilayah.

Nilai rasio yang tinggi dapat menunjukkan bahwa kelompok potensial dalam penduduk telah dapat terserap dengan baik oleh lapangan pekerjaan yang ada, dimana hal ini

dapat berdampak baik bagi peningkatan PDRB per kapita. Namun disisi lain, rasio yang tinggi belum tentu menunjukkan indikasi baik bagi kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah. Misalnya, ketika rasio EPR suatu wilayah tinggi disebabkan oleh banyaknya penduduk usia muda yang lebih memilih untuk bekerja ketimbang sekolah karena alasan biaya, jarak, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, kajian terhadap rasio ini hendaknya dilakukan secara seksama dengan juga mempertimbangkan indikator ketenagakerjaan lainnya seperti TPAK dan tingkat pengangguran.

Tabel 4.1

Rasio Penduduk Kabupaten Wakatobi Usia 15 Tahun keatas yang Bekerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun keatas (*Employment-to-population Ratio*) tahun 2017-2020

<i>Employment-to-population Ratio (EPR)</i>	TAHUN			
	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-laki	75.45	82.70	79.31	75.64
Perempuan	52.64	56.44	57.33	56.08
Total	63.30	68.76	67.62	65.23

Sumber : Sakernas 2017-2019

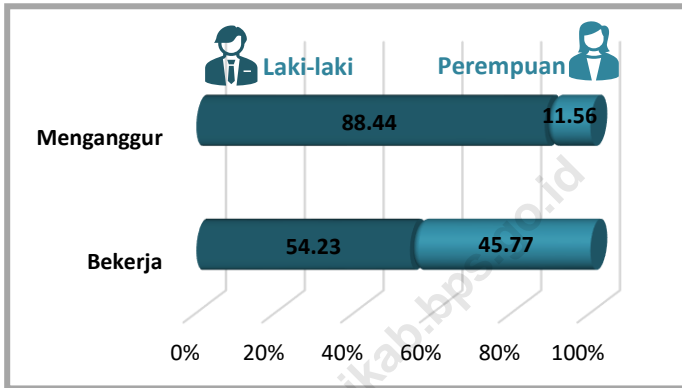
Berdasarkan informasi pada tabel 4.1 , EPR Kabupaten Wakatobi pada kurun waktu 4 tahun terakhir rata-rata sebesar 66,23 persen. EPR Kabupaten Wakatobi mengalami peningkatan pada periode tahun 2017 hingga 2018, yakni dari 63,30 persen menjadi 68,76 persen. Pada tahun 2018 hingga 2020, nilai EPR Kabupaten Wakatobi menurun cukup signifikan, yakni 68,76 persen pada tahun 2018 turun 67,62 pada tahun 2019 dan 65,23 pada tahun 2020.

Penurunan EPR pada tahun 2020 merupakan suatu indikasi adanya penurunan persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja, artinya serapan tenaga kerja pada lapangan pekerjaan yang ada kurang baik di tahun 2020.

4.2. Penduduk yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin

Apabila dilihat berdasarkan jenis kelamin, proporsi angkatan kerja perempuan yang bekerja tidak terpaut jauh dibanding laki-laki. Sebanyak 54,23 persen diantara penduduk yang bekerja berjenis kelamin laki-laki, dan 45,77 persen sisanya adalah perempuan. Sedangkan pada kelompok penganggur, sebanyak 88,44 persen diantaranya adalah laki-laki dan 11,56 persen perempuan.

Grafik 4.1
Angkatan Kerja di Kabupaten Wakatobi menurut
Kelompok Bekerja atau Menganggur dan Jenis Kelamin,
tahun 2020



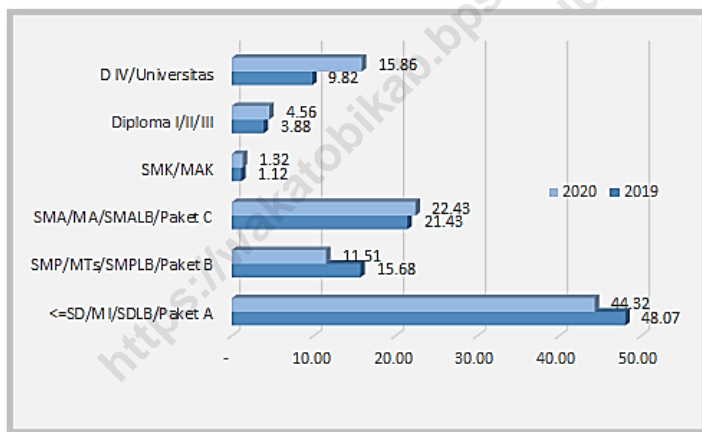
Sumber: Sakernas 2020

Pada kelompok penganggur, proporsi angkatan kerja laki-laki yang menganggur jauh lebih banyak daripada proporsi perempuan yang menganggur. Hal ini dipengaruhi pula oleh jumlah angkatan kerja yang memang lebih didominasi oleh laki-laki, sedangkan wanita lebih mendominasi pada kelompok bukan angkatan kerja. Berdasarkan data yang ada, masih tampak bahwa peran laki-laki sebagai pencari nafkah keluarga dan perempuan mengurus rumah tangga masih berlaku di kalangan masyarakat, meski sudah mulai bergeser seiring dengan maraknya perempuan yang berkarir di berbagai bidang pekerjaan.

4.3. Penduduk yang Bekerja Menurut Ijazah Terakhir yang Dimiliki

Menurut tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan, kelompok penduduk lulusan SD kebawah memiliki persentaseterbanyak.

Grafik 4.2.
Persentase Penduduk Kabupaten Wakatobi Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki, Tahun 2019-2020



Sumber: Sakernas 2019-2020

Kelompok penduduk lulusan SD kebawah memiliki persentase terbanyak, yakni sebanyak 44,32 persen dari seluruh penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja. Dari hasil Sakernas 2020, sebanyak 20,42 persen pekerja memiliki latar belakang pendidikan diploma, sarjana, maupun pasca sarjana dari 48.397 penduduk bekerja di

Kabupaten Wakatobi.

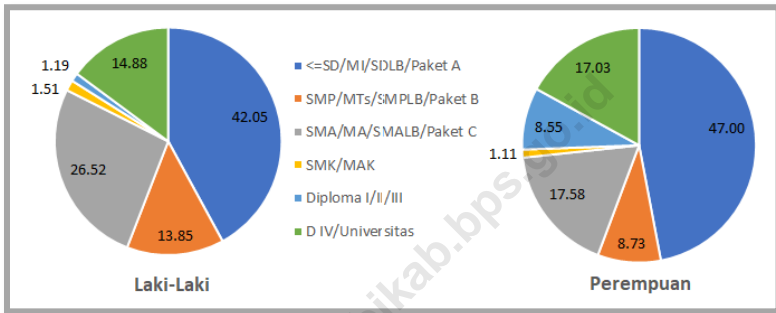
Pada grafik 4.3, tampak bahwa tenaga kerja yang berlatar belakang pendidikan rendah di Kabupaten Wakatobi dapat terserap baik pada lapangan pekerjaan yang ada. Namun demikian, bila dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya, persentase penduduk bekerja yang berlatar pendidikan SD kebawah mengalami penurunan, dari 48,07 persen pada tahun 2019 menjadi 44,32 persen pada tahun 2020. Jumlah penduduk bekerja yang berlatar belakang pendidikan SMA/SMK sederajat, Diploma, Sarjana dan Universitas mengalami peningkatan pada tahun 2020. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa penduduk yang kembali ke kampung halaman pada masa pandemi adalah para pekerja yang pada umumnya berpendidikan SMA/SMK sederajat ke atas.

Peningkatan di bidang pendidikan diperlukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia para pekerja di Kabupaten Wakatobi, namun bekal keterampilan atau *skill* yang matang, baik *skill* dalam proses produksi, perencanaan, hingga pemasaran juga sangat perlu dikembangkan untuk menjawab tantangan perkembangan ekonomi di era modern ini.

Pada grafik 4.3 dibawah ini, tampak bahwa baik di kalangan pekerja laki-laki maupun perempuan, sebagian besar

berlatar belakang pendidikan SD kebawah.

Grafik 4.3.
Proporsi Penduduk Kabupaten Wakatobi Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja menurut Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi yang Dimiliki, tahun 2020



Sumber: Sakernas 2020

Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa dari sisi kualitas, tenaga kerja perempuan sudah seimbang dengan kualitas tenaga kerja laki-laki. Hal ini tentunya harus diimbangi dengan persamaan kesempatan kerja antara laki-laki dan perempuan, baik dari sisi kuantitas maupun regulasi yang mengakomodir persamaan kesempatan perempuan pada berbagai bidang pekerjaan.

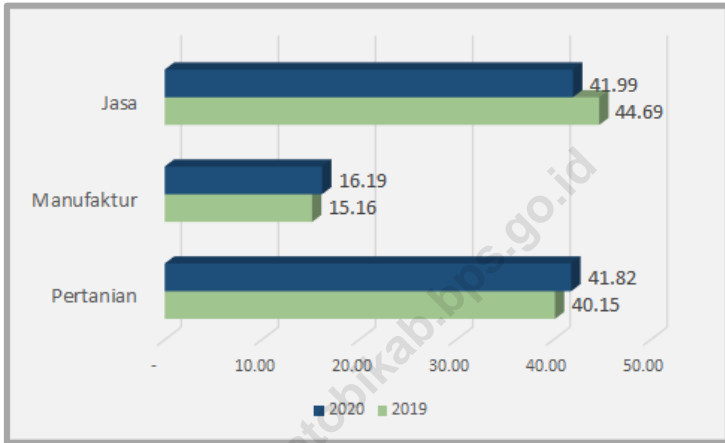
Jika ditelaah lebih lanjut, persentase penduduk bekerja laki-laki yang berlatar belakang pendidikan SMA/SMK sederajat (28,03 persen) lebih banyak dibandingkan persentase penduduk bekerja perempuan yang berlatar belakang pendidikan SMA/SMK sederajat (18,69

persen).

4.4. Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Analisis terkait lapangan usaha memiliki nilai strategis bagi pemerintah, utamanya dalam membantu menentukan fokus kebijakan ketenagakerjaan. Misalnya, apabila proporsi penduduk yang bekerja di sektor jasa paling tinggi, maka pemerintah dapat lebih menitikberatkan pembangunan ketenagakerjaan pada sektor ini. Meski demikian, dalam melakukan kajian terhadap kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah, data tentang lapangan pekerjaan/usaha penduduk ini hendaknya disandingkan dengan data ketenagakerjaan lainnya.

Grafik 4.4.
Persentase Penduduk Kabupaten Wakatobi Usia 15
Tahun Keatas yang Bekerja menurut Lapangan
Pekerjaan, Tahun 2019-2020

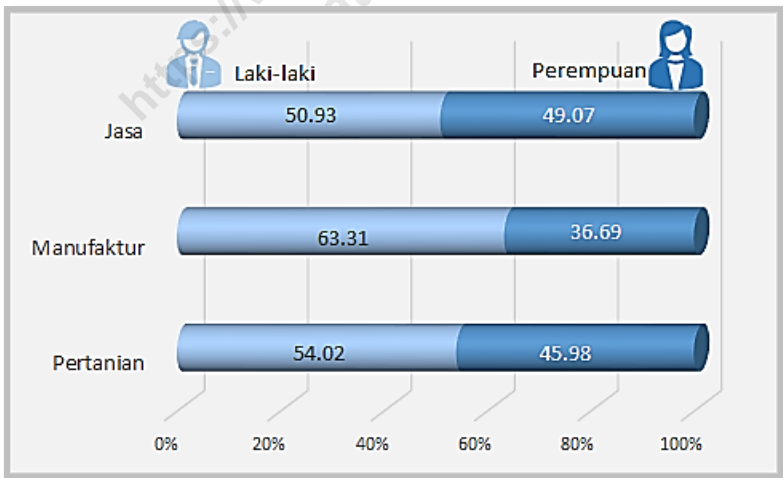


Sumber: Sakernas 2019-2020

Berdasarkan data Sakernas 2020, sebagian besar penduduk yang bekerja di Kabupaten Wakatobi bergerak pada sektor jasa dan Pertanian yakni sebesar 41,99 persen dan 41,82 persen. Persentase penduduk bekerja pada sektor jasa mengalami penurunan yakni dari 44,69 persen di tahun 2019 menjadi 41,99 di tahun 2020. Sedangkan untuk sektor manufaktur dan pertanian mengalami peningkatan pada tahun 2020, dimana penduduk bekerja yang bergelut di sektor manufaktur dari 15,16 persen menjadi 16,19 persen dan sektor pertanian dari 40,15 menjadi 41,82 persen.

Grafik 4.5.

Persentase Penduduk Kabupaten Wakatobi Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan dan Jenis Kelamin, Tahun 2020



Sumber: Sakernas 2020

Jika dibandingkan menurut jenis kelamin untuk tiga sektor lapangan pekerjaan di Kabupaten Wakatobi, penduduk yang bekerja di lapangan usaha jasa sebagian besar berjenis kelamin laki-laki (50,93 persen), namun dominasi laki-laki pada lapangan usaha ini tidak terlalu besar. Begitupula pada kelompok lapangan usaha manufaktur dan pertanian lebih didominasi oleh pekerja laki-laki yakni 63,31 persen dan 54,02 persen.

4.5. Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pada Pekerjaan Utama

Berdasarkan status pekerjaannya, penduduk yang bekerja terbagi kedalam tujuh kelompok status pekerjaan, yaitu:

- 4.5.1. Berusaha sendiri
- 4.5.2. Berusaha dibantu dengan buruh tidak tetap/tidak dibayar
- 4.5.3. Berusaha dibantu dengan buruh tetap
- 4.5.4. Buruh/Karyawan/Pegawai
- 4.5.5. Pekerja bebas non pertanian
- 4.5.6. Pekerja bebas di pertanian
- 4.5.7. Pekerja keluarga/tidak dibayar

Proporsi penduduk berdasarkan status pekerjaannya perlu diketahui antara lain untuk melihat seberapa besar

penduduk yang telah mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri (mempunyai usaha) dan seberapa besar penduduk yang mengisi lowongan-lowongan pekerjaan yang disediakan oleh orang lain. Selain itu, data ini diperlukan pula dalam penentuan kebijakan terkait program pembinaan usaha, peningkatan kapasitas pekerja, dan lain sebagainya.

Pada Tabel 4.2, menurut pengelompokan 7 kategori diatas, tampak bahwa dominasi status pekerjaan utama penduduk Kabupaten Wakatobi pada tahun 2020 adalah mereka yang bekerja sebagai pengusaha (berusaha sendiri), yakni sebesar 31,19 persen dariseluruh penduduk yang bekerja. Sedangkan penduduk yang berstatus buruh/karyawan/pegawai sebanyak 28,76 persen dari seluruh pekerja. Persentase pekerja yang berstatus berusaha ini meningkat jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019, dimana pada tahun 2019 persentase pekerja yang berstatus pengusaha sebanyak 25,58 persen. Hal ini menunjukkan semangat kewirausahaan diantara tenaga kerjandi Kabupaten Wakatobi semakin kuat. Meski demikian, berbagai kegiatan ekonomi/usaha mikro kreatif di Kabupaten Wakatobi perlu terus didukung oleh pemerintah supaya dapat terus berkembang dan berdaya guna. Budaya kerja baru yang tidak hanya bergantung pada lapangan pekerjaan yang disediakan pemerintah maupun swasta, melainkan budaya

menciptakan lapangan usaha baru bagi diri sendiri bahkan orang lain perlu terus digelorakan.

Grafik 4.6.
Persentase Penduduk Kabupaten Wakatobi yang Bekerja menurut Status Pada Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin,tahun 2020

Status pada Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha sendiri	33.07	28.94	31.19
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar	24.82	15.70	20.64
Berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar	1.94	0.21	1.15
Buruh/Karyawan/Pegawai	30.39	26.83	28.76
Pekerja bebas di Pertanian	0.45	0.57	0.50
Pekerja bebas di non pertanian	1.36	0.17	0.81
Pekerja Keluarga/tidak dibayar	7.97	27.58	16.95
Jumlah	100.00	100.00	100.00

Sumber: Sakernas 2020

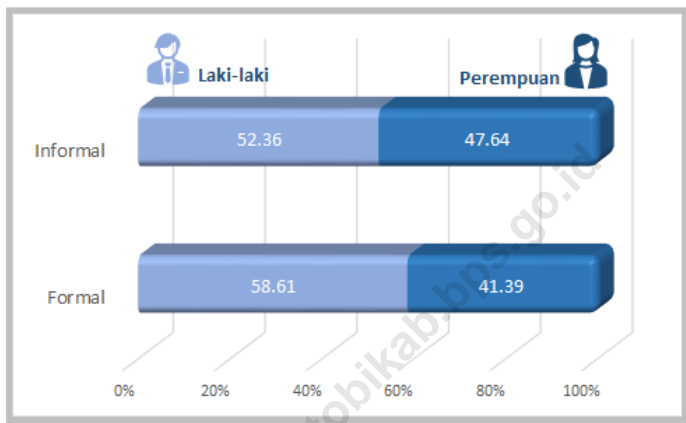
Dalam menghadapi era pasar bebas saat ini, menunggupekerjaan saja tidak akan cukup karena lapangan pekerjaan yang ada tidak akan bisa menampung seluruh tenaga kerja. Oleh karena itu, jiwa *enterpreuner* atau jiwa kewirausahaan sangat perlu untuk dikembangkan. Peran pemerintah sangat besar dalam mengembangkan potensi

masyarakat ini, diantaranya dengan memberikan berbagai pelatihan kerja, memberikan kemudahan dalam pinjaman modal usaha, mempermudah ijin membuka usaha, dan lain sebagainya. Dengan besarnya dukungan dari pemerintah atas usaha kreatifitas baru, maka akan banyak tenaga kerja yang mampumenciptakan lapangan pekerjaannya sendiri bahkan mungkin dapat membuka lowongan pekerjaan baru bagi orang lain.

Pengelompokan penduduk yang bekerja kedalam tujuh kategori diatas juga dapat digunakan sebagai dasar pengelompokkan pekerja pada sektor formal dan pekerja informal. Secara sederhana, kegiatan ekonomi formal dan informal penduduk yang bekerja dapat diperoleh melalui pendekatan terhadap status seorang pekerja dalam pekerjaan utamanya.

1. *Pekerja formal* meliputi pekerja dengan status pekerjaan berusaha dengan bantuan buruh tetap, dan pekerja dengan status sebagai buruh/karyawan/pekerja dibayar.
2. *Pekerja Informal* meliputi pekerja dengan status pekerjaan sebagai berusaha dengan bantuan buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar/, pekerja bebas dipertanian, pekerja bebas non pertanian, berusaha sendiri (pedagang, jasa, dan lain-lain), dan pekerja tidak dibayar.

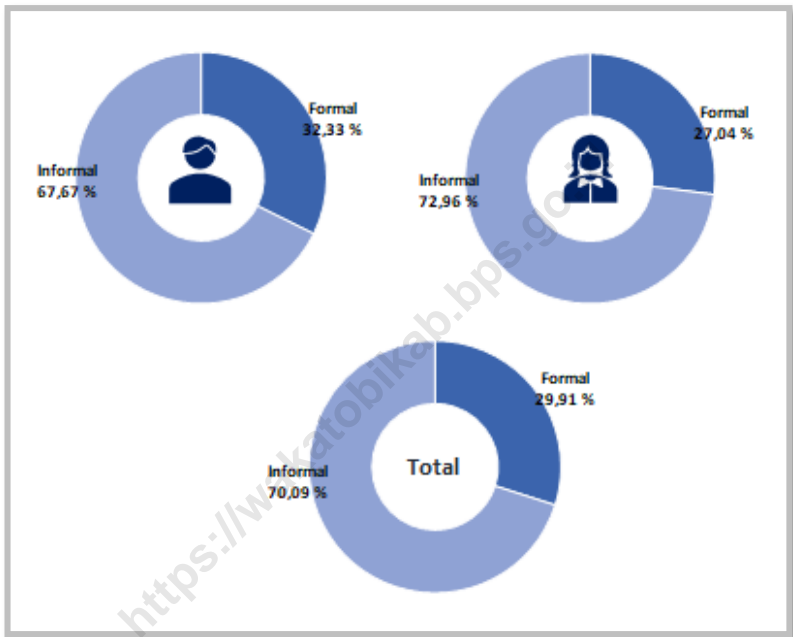
Grafik 4.7.
Proporsi Penduduk Kabupaten Wakatobi Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Pengelompokan Sektor Formal/Informal, Tahun 2020



Sumber: Sakernas 2020

Pada grafik 4.7 tampak bahwa pada golongan pekerjaan formal maupun non formal, persentase laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Namun, dominasi laki-laki lebih terlihat pada kelompok pekerja formal dimana 58,61 persen pekerja formal berjenis kelamin laki-laki dan 41,39 persennya berjenis kelamin perempuan.

Grafik 4.8.
Proporsi Penduduk Kabupaten Wakatobi Usia 15 Tahun
Keatas yang Bekerja Menurut Sektor Formal/Informal
dan Jenis Kelamin, tahun 2020



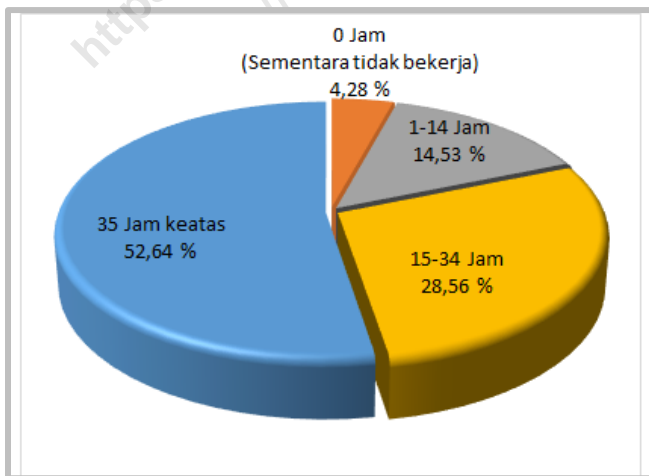
Sumber: Sakernas 2020

Grafik 4.8, menunjukkan bahwa pada kelompok penduduk bekerja yang berjenis kelamin laki-laki, lebih banyak pekerja sektor informal dibandingkan dengan pekerja sektor formal. Begitupula pada kelompok penduduk perempuan, lebih banyak yang bekerja di sektor informal.

4.6. Penduduk yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja Keseluruhan

Seseorang dikatakan bekerja dengan jumlah jam kerja normal apabila selama seminggu terakhir (masa referensi survei) dia bekerja tidak kurang dari 35 jam. Seseorang yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu tergolong kedalam kelompok setengah penganggur. Apabila seseorang yang sudah memiliki pekerjaan, namun selama seminggu terakhir (masa referensi survei) karena satu dan lain hal yang bersangkutan memiliki jam kerja nol jam, maka yang bersangkutan dikatakan sedang sementara tidak bekerja.

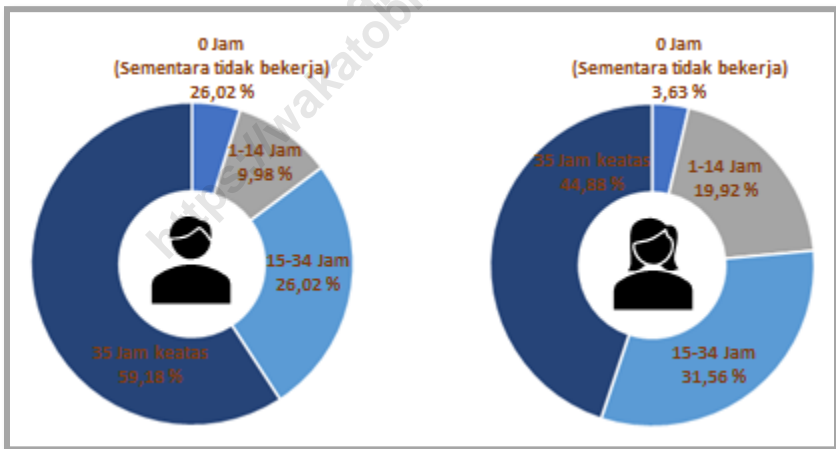
Grafik 4.9.
Persentase Penduduk Kabupaten Wakatobi Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja menurut Jam Kerja, Tahun 2020



Sumber: Sakernas 2020

Berdasarkan data Sakernas tahun 2020, sebagian besar pekerja di Kabupaten Wakatobi bekerja selama 35 jam keatas selama seminggu yang lalu (masa referensi survei) yaitu sekitar 52,64 persen (laki-laki+perempuan). Diantara penduduk yang bekerja, sebanyak 4,28 persen merupakan memiliki jumlah jam kerja nol selama seminggu yang lalu atau dapat dikategorikan sebagai sementara tidak bekerja.

Grafik 4.10.
Persentase Penduduk Kabupaten Wakatobi Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja menurut Jam Kerja dan Jenis Kelamin, Tahun 2020



Sumber: Sakernas 2020

Jika dibedakan menurut jenis kelamin, sebagian besar penduduk laki-laki bekerja selama 35 jam atau lebih dalam seminggu, yakni sebanyak 59,18 persen dari seluruh pekerja laki-laki. Demikian pula pada kelompok penduduk perempuan yang bekerja, sebagian besar juga bekerja selama 35 jam atau lebih dalam seminggu yakni 44,88 persen. Meski pekerja perempuan dan laki-laki sebagian besar bekerja 35 jam atau lebih dalam seminggu, namun persentase kelompok pekerja laki-laki lebih besar dibandingkan proporsi pekerja perempuan. Dari fenomena ini, dapat dikatakan bahwa secara umum, lebih banyak laki-laki yang memiliki jam kerja tinggi dibandingkan dengan perempuan.

Dalam hal batasan jam kerja, BPS membagi pekerja menjadi dua kelompok, yakni pekerja tidak penuh (setengah penganggur) yang bekerja selama kurang dari 35 jam dalam seminggu, dan pekerja penuh yang bekerja selama 35 jam atau lebih selama seminggu. Pada tahun 2019, sebanyak 51,46 persen dari pekerja di Kabupaten Wakatobi tergolong pada pekerja penuh (*full time worker*) sedangkan 48,54 persen sisanya merupakan pekerja tidak penuh (setengah penganggur). Sedangkan pada tahun 2020, sebanyak 52,64 persen dari pekerja di Kabupaten Wakatobi masuk sebagai pekerja penuh, sedangkan sisanya 47,36 persen lainnya termasuk kategori pekerja tidak penuh karena bekerja kurang

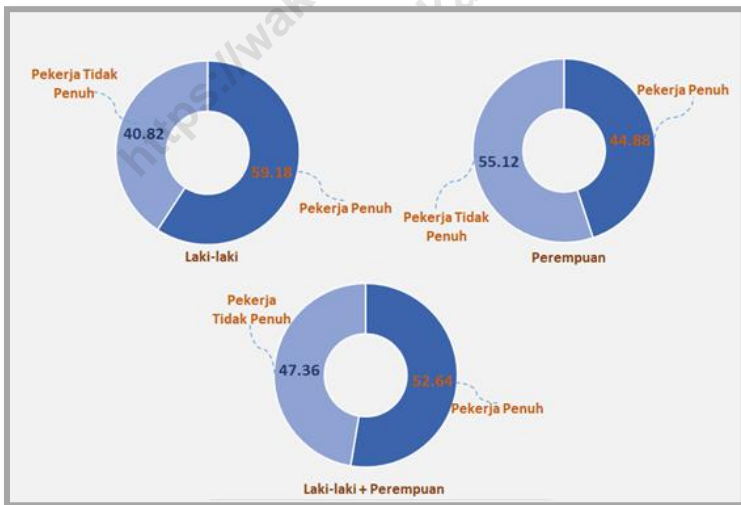
dari 35 jam seminggu.

Proporsi setengah penganggur di kalangan pekerja menurun dari 48,54 persen pada tahun 2019 menjadi 47,36 persen pada tahun 2020.

Jika dibedakan menurut jenis kelamin, pada tahun 2020, proporsi pekerja setengah penganggur di kalangan perempuan lebih besar dari pada laki-laki, yakni 55,12 persen untuk pekerja perempuan dan 40,82 persen untuk pekerja perempuan laki-laki.

Grafik 4.11.

Proporsi Penduduk Kabupaten Wakatobi Usia 15 Tahun yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja Selama Seminggu dan Jenis Kelamin, Tahun 2020



Sumber: Sakernas 2020

BAB V

PROFIL PENGANGGURAN TERBUKA

5.1. Profil Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran selalu menjadi topik yang diperhatikan ketika melakukan kajian ketenagakerjaan. Besarnya jumlah pengangguran di suatu wilayah seringkali menjadi indikator penting keberhasilan penyerapan tenaga kerja. Dalam dunia kerja, persaingan yang terjadi membuat lapangan pekerjaan yang ada tidak dapat sepenuhnya menyerap seluruh tenaga kerja. Akibatnya, mereka yang tak mampu bersaing baik karena faktor kualitas SDM maupun karena faktor keburuntungan dan lainnya akan menjadi penganggur karena tidak mendapat pekerjaan.

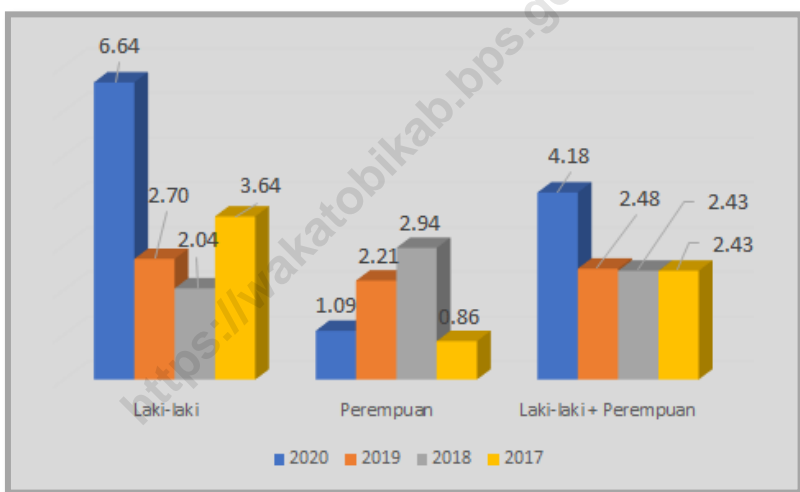
Sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya, Tingkat Penganggur Terbuka di Kabupaten Wakatobi pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan hingga mencapai 4,18 persen. Peningkatan angka pengangguran pada tahun 2020 dipicu oleh adanya pandemi yang membuat sebagian pekerja khususnya pekerja sektor pariwisata dan sektor pendukungnya yang dirumahkan bahkan diberhentikan akibat menurunnya pendapatan perusahaan dan kurangnya wisatawan asing.

5.2. Penganggur Terbuka Menurut Jenis Kelamin

Jika dilihat pada grafik 5.1, pada tahun 2020, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) untuk penduduk laki-laki di Kabupaten Wakatobi lebih besar dibandingkan dengan TPT perempuan.

Grafik 5.1.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Wakatobi menurut Jenis Kelamin tahun 2017-2020



Sumber: Sakernas 2017 - 2020

Jika diantara 100 penduduk laki-laki siap kerja terdapat 6 orang yang menganggur, diantara 100 penduduk perempuan yang siap kerja hanya terdapat 1 orang yang menganggur sebagaimana terlihat pada grafik 5.1. Kondisi ini menyebabkan *gap* angka pengangguran antara laki-laki dan perempuan pada tahun 2020 ini mengalami kenaikan

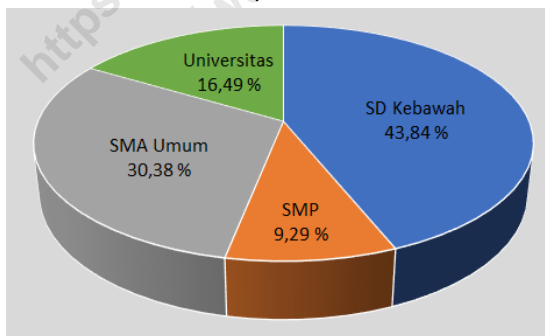
dibandingkan periode 2017-2019. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan tingkat pengangguran di Kabupaten Wakatobi pada tahun 2020 lebih dominan terjadi pada kalangan penduduk laki-laki.

5.3. Penganggur Terbuka Menurut Ijazah Terakhir yang Dimiliki

Analisis terhadap latar belakang pendidikan para penganggur dapat dimanfaatkan untuk menentukan jenis lapangan pekerjaan seperti apa yang dibutuhkan untuk dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Grafik 5.2.

Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Tergolong Sebagai Penganggur di Kabupaten Wakatobi menurut Tingkat Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan, Tahun 2020



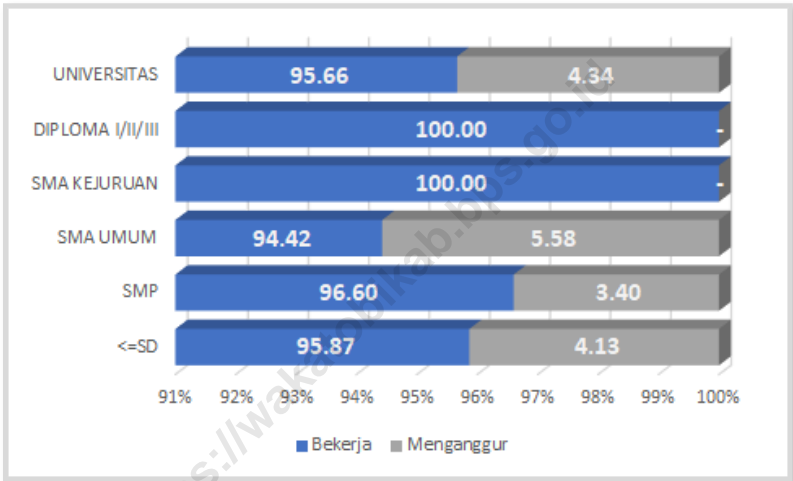
Sumber: Sakernas 2020

Berdasarkan data hasil Sakernas 2020, sebanyak 43,84 persen dari penganggur di Kabupaten Wakatobi

berlatar belakang pendidikan SD kebawah. Sedangkan proporsi terbesar kedua adalah penduduk yang berlatar belakang SMA Umum sebanyak 30,38 persen dari seluruh penganggur. Sementara itu, tidak terdapat penduduk yang berlatar belakang SMA Kejuruan dan Diploma I/II/III yang menjadi pengangguran. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah kejuruan dan Diploma lebih mudah diserap oleh lapangan kerja, baik sebagai berusaha sebdiri maupun buruh atau karyawan.

Apabila ditelaah lebih lanjut terkait dengan proporsi jumlah angkatan kerja yang tersedia di Kabupaten Wakatobi menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, sebagaimana terlihat pada grafik 5.4, penduduk yang berpendidikan SMA Kejuruan dan Diploma 100 persen terserap lapangan kerja. Sementara angkatan kerja yang berpendidikan SMP Sederajat, terdapat 3,40 persen saja yang menganggur sedangkan 96,60 persen sisanya bekerja. Kelompok angkatan kerja yang memiliki proporsi penganggur paling banyak adalah angkatan kerja yang berlatar belakang pendidikan SMA Umum, dimana 5 dari 100 orang angkatan kerja berpendidikan SMA Umum masih menganggur.

Grafik 5.4.
Proporsi Penduduk Kabupaten Wakatobi Usia 15 Tahun Keatas yang Tergolong Angkatan Kerja yang Bekerja dan Menganggur menurut Ijazah Terakhir yang Dimiliki, Tahun 2020



Sumber: Sakernas 2020

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN WAKATOBI**

Jl. Utudae Samad No. 25, Wakatobi, 93795

Telp/Faks : (0404) 2222003

Homepage : <https://wakatobikab.bps.go.id>

E-mail : bps7407@bps.go.id